

UNIVERSITAS
NIAS



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efisiensi

2.1.1 Pengertian Efisiensi

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efisiensi merupakan bagian dari prinsip value for money, bersama dengan efektivitas dan ekonomis. Efisiensi menekankan pada rasio yang ideal antara sumber daya yang digunakan dengan output atau kegunaan yang diperoleh. Pemerintah daerah yang efisien adalah yang dapat mencapai indikator kinerja melalui penggunaan dana seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Efisiensi keuangan merupakan konsep dalam manajemen keuangan yang mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2021), efisiensi keuangan dapat diukur melalui rasio antara input dan output yang dihasilkan dalam suatu kegiatan. Semakin rendah biaya yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama atau lebih besar, maka semakin efisien suatu organisasi dalam mengelola keuangan.

Menurut Halim (2022), efisiensi keuangan pada sektor publik harus mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam konteks pemerintahan, efisiensi keuangan berkaitan erat dengan bagaimana alokasi anggaran dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Efisiensi keuangan mengacu pada kemampuan suatu entitas dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya minimal (Brigham & Houston, 2021). Menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe (2020), efisiensi keuangan dapat diukur dari sejauh mana perusahaan atau organisasi mampu mengelola aset dan liabilitasnya guna menghasilkan keuntungan yang optimal.

Efisiensi adalah pencapaian hasil optimal dengan sejumlah masukan tertentu atau penggunaan input yang paling minimal dalam mendapatkan hasil. Efisiensi diartikan sebagai suatu perbandingan antara hasil dan input yang dihubungkan dengan kriteria kinerja atau sasaran yang telah ditentukan. Efisiensi menjelaskan hubungan antara barang dan jasa (hasil) yang dihasilkan dari suatu aktivitas dengan sumber daya (input). Dari beberapa pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa efisiensi diartikan sebagai pengukuran atas hasil output yang maksimum dengan input tertentu atau dengan penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu.

Efisiensi dapat dinilai melalui rasio yang membandingkan antara hasil (output) dan sumber daya (input) sekunder, sementara analisis yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengeluaran rutin menerapkan ukuran tingkat efisiensi yang berupa perbandingan antara pelaksanaan pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan atau penerimaan daerah dikali seratus dalam bentuk persentase. Menurut Widiyana (2016), mengatakan bahwa pengukuran efisiensi menentukan sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi di sektor publik sesuai dengan sasaran pendapatan yang telah ditetapkan untuk sektor publik. Tingkat efisiensi dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Istilah efisiensi adalah salah satu istilah yang sering dijumpai dalam pekerjaan atau proyek. Secara umum, istilah efisiensi ini merujuk kepada cara yang dilakukan agar suatu pekerjaan mencapai hasil yang maksimal tanpa menghabiskan sumber daya secara berlebihan atau membuang-buang sumber daya yang telah tersedia.

Menurut Mahmudi (2016), efisiensi dalam sektor publik berarti bagaimana pemerintah mampu menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yang maksimal.

Efisiensi bukan hanya sekadar mencapai target output, tetapi juga mempertimbangkan kualitas hasil serta ketepatan waktu dan biaya. Pengelolaan keuangan yang efisien memungkinkan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan anggaran terbatas.

Nasution (2020) membagi efisiensi menjadi dua dimensi utama, yaitu: efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis adalah kemampuan unit kerja menghasilkan output maksimal dari input tertentu, sementara efisiensi alokatif adalah kemampuan untuk mengalokasikan input pada aktivitas yang menghasilkan manfaat paling besar bagi masyarakat. Kombinasi dari keduanya disebut efisiensi ekonomis, dan ini menjadi standar evaluasi dalam pengelolaan anggaran sektor publik.

Menurut Fahmi (2023), penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang baik akan mengurangi duplikasi data, mempercepat pelaporan keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan digitalisasi, proses penganggaran dan pengawasan menjadi lebih akurat dan cepat, sehingga mendukung efisiensi keuangan secara keseluruhan.

2.1.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan perwujudan pelaksanaan dari rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk anggaran. Menurut Mardiasmo (2009), realisasi anggaran menggambarkan tingkat pencapaian penggunaan dana yang telah direncanakan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi anggaran mengindikasikan kemampuan efektif dan efisien organisasi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan dan operasional organisasi sektor publik. Tingkat realisasi dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, keandalan perencanaan anggaran, serta tingkat akuntabilitas manajemen keuangan publik (Mahmudi, 2016).

Menurut Halim (2007), indikator yang biasa digunakan untuk menilai realisasi anggaran meliputi:

- a. Persentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan.
- b. Persentase realisasi belanja terhadap alokasi anggaran.
- c. Persentase realisasi pembiayaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran antara lain adalah:

- a. Ketepatan perencanaan anggaran.
- b. Efisiensi dalam pelaksanaan program kegiatan.
- c. Kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan dan sumber daya lainnya.
- d. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku (Nordiawan & Ayuningtyas, 2010).

Evaluasi atas realisasi anggaran penting dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah direncanakan. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi penyebab deviasi antara anggaran dengan realisasinya, baik itu deviasi positif (efisiensi) maupun negatif (inefisiensi).

Menurut Mahsun (2013), mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan bentuk nyata dari rencana keuangan untuk waktu yang akan datang yang biasanya mencakup periode satu tahun dan diungkapkan dalam nilai uang. Anggaran adalah rencana singkat organisasi yang mengkonversi sejumlah program menjadi rencana keuangan tahunan yang lebih spesifik.

Maka dengan demikian ditentukan sasaran berkelanjutan, sasaran jangka pendek, pencapaian yang diinginkan, rencana yang akan diterapkan, dan seterusnya. Dalam fungsi ini berhubungan dengan segala hal yang ingin diwujudkan dan dicapai oleh perusahaan di masa depan. Hal ini mencakup penentuan produk yang akan diproduksi, metode produksinya, sumber daya yang diperlukan untuk memberikan output tersebut, cara memasarkan output yang dimaksud, dan lain-lain.

Selanjutnya menentukan semua hal yang ingin dicapai dan dihasilkan oleh perusahaan di masa depan, perusahaan perlu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Ini dimulai dengan usaha untuk mendapatkan bahan baku, mencari peralatan yang diperlukan untuk mengolah bahan baku tersebut, fasilitas yang diperlukan untuk memproses produk, merekrut tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang sesuai, mencari dana yang diperlukan untuk memproduksi barang yang direncanakan, dan lain-lain.

Setelah semua sumber daya yang diperlukan didapatkan, tanggung jawab manajemen berikutnya yaitu memfokuskan dan mengatur setiap sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar bisa digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pengeluaran merupakan semua biaya rutin dari rekening kas umum yang akan mengurangi ekuitas dana lancar selama periode tahun anggaran. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengindikasikan bahwa pengeluaran diakui ketika terjadi penarikan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Definisi lain menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, pengeluaran terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Belanja langsung

Belanja Langsung merujuk pada pengeluaran yang alokasinya langsung terhubung dengan program serta kegiatan. Belanja Langsung meliputi pengeluaran untuk pegawai, pengeluaran untuk barang dan jasa, serta pengeluaran untuk modal.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang direncanakan tanpa hubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kategori belanja tidak langsung dibagi berdasarkan jenisnya, yang mencakup belanja untuk pegawai, belanja untuk bunga, dan belanja subsidi.

3. Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah, serta pada gilirannya akan menambah pengeluaran yang bersifat rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Anggaran pengeluaran dapat dipahami sebagai suatu rencana finansial dalam lembaga yang mencakup perkiraan biaya dan sumber pendapatan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan data sejarah sebagai acuan dalam mendanai pengeluaran di organisasi atau lembaga tersebut.

2.1.3 Prinsip- Prinsip Efisiensi

Istilah efisiensi merupakan salah satu ungkapan yang kerap muncul dalam konteks pekerjaan atau proyek. Secara umum, efisiensi ini mengacu pada metode yang diterapkan untuk memastikan suatu pekerjaan menghasilkan hasil optimal tanpa mengeluarkan sumber daya secara berlebihan atau membuang-buang sumber daya yang sudah ada. Efisiensi juga sangat berkaitan dengan penganggaran, karena anggaran yang ditentukan harus mendukung kelancaran suatu program dan memastikan bahwa anggaran tersebut tidak kurang atau berlebih, sehingga penggunaan sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Prinsip-prinsip efisiensi terdiri dari hal-hal berikut:

a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran atau rencana finansial merupakan diagram yang memperlihatkan aliran dana selama jangka waktu tertentu di suatu lembaga. Anggaran berperan dalam mengidentifikasi titik-titik di mana lembaga atau organisasi melakukan pembelajaan yang berlebihan serta membantu memperbaiki pola pengeluaran yang kurang baik. Perencanaan keuangan yang efektif adalah perencanaan yang mencakup semua aktivitas maupun program yang akan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Perencanaan anggaran yang komprehensif ini sering disebut dengan istilah Budget Komprehensif yang terdiri dari:

1. Anggaran Penaksiran (*forecasting budget*), maksudnya bahwa anggaran memuat seluruh, perkiraan tentang kegiatan organisasi dalam jangka waktu (periode) tertentu dan taksiran keadaan atau posisi finansial organisasi untuk waktu yang akan datang.
2. Anggaran Variabel (*variable budget*), yaitu anggaran yang memuat mengenai tingkatan perubahan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan perubahan aktivitas program organisasi. Misalnya biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya.
3. Analisis Statistik, merupakan proses pengolahan informasi dan data untuk memahami estimasi nilai dalam penyusunan anggaran. Di samping itu, analisis statistik dibutuhkan untuk menilai pelaksanaan program dalam pemanfaatan anggaran.
4. Laporan Anggaran (*budget report*), Berisi laporan mengenai pelaksanaan anggaran yang disertai dengan analisis antara rencana anggaran dan realitas di lapangan, sehingga bisa diidentifikasi kekurangan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Analisis perbandingan dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah penyimpangan agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

b. Penyederhanaan

Penyederhanaan diartikan sebagai cara mengubah suatu sistem yang kompleks atau tugas yang sulit menjadi lebih sederhana atau ringan, dalam konteks ini, penyederhanaan dalam struktur birokrasi sangat penting agar efisiensi anggaran dapat optimal. Tanpa adanya proses penyederhanaan, sebuah sistem dalam suatu lembaga atau organisasi dapat memperlambat atau bahkan menyulitkan pelaksanaan tugas. Tanpa penghematan, jelas bahwa efisiensi tidak dapat dicapai, karena tanpa adanya pengurangan biaya, sebuah lembaga atau organisasi tentunya akan menghadapi pengeluaran yang sangat besar.

c. Tepat guna

Dalam meraih tingkat efisiensi yang optimal pada anggaran, sebuah lembaga atau organisasi perlu untuk mengidentifikasi program atau aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas yang dimaksud adalah suatu program atau kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi lembaga atau organisasi tersebut agar dapat berkembang di masa depan.

d. Tepat waktu pelaksanaan

Dalam melaksanakan suatu proyek atau aktivitas, tentunya sudah disusun jadwal dan durasi pelaksanaannya, serta anggaran yang diperlukan. Proyek atau aktivitas akan menjadi efisien jika pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan atau bahkan lebih cepat dari yang direncanakan. Sebaliknya, keterlambatan atau terhentinya proyek di tengah jalan akan meningkatkan biaya.

e. Penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Setiap instansi atau organisasi setiap periode tertentu perlu mengevaluasi program-programnya, misalnya dengan merencanakan sebuah program dan juga anggaran, evaluasi diakhir periode juga penting, agar sebuah instansi atau organisasi bisa lebih maju dan berkembang. Dengan adanya evaluasi, suatu lembaga atau organisasi dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk

program-program di masa depan dengan menganalisis pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, sehingga mereka dapat memperkirakan program mana yang perlu mendapatkan alokasi anggaran lebih atau bahkan dikurangi agar efisiensinya lebih optimal. Efisiensi mensyaratkan individu untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang hemat, cepat, aman, dan tepat waktu, di mana hal ini juga mengharuskan seseorang untuk bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Pekerjaan yang efisien dapat dicapai melalui evaluasi, dengan membandingkan antara input dan output yang diterima. Efisiensi berarti mencari metode terbaik untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan finansial daerah mencakup seluruh proses yang melibatkan perencanaan, penerapan, pencatatan, pelaporan, akuntabilitas, serta pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20013 pasal 3, manajemen keuangan daerah mencakup kekuasaan administrasi keuangan daerah, prinsip umum dan struktur APBD, penyusunan draf APBD, penetapan APBD, pembentukan dan persetujuan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, amandemen APBD, manajemen kas, pengelolaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas pelaksanaan APBD, pengembangan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, serta pengelolaan keuangan BLUD. Manajemen keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, mematuhi hukum yang berlaku, serta bersifat efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepatutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Proses manajemen keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD bisa diartikan sebagai rencana keuangan tahunan untuk pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah serta DPRD, dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Dengan demikian, APBD menjadi suatu kesepakatan kolektif antara

eksekutif dan legislatif yang dicatat dalam peraturan daerah dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan serta kapasitas dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD berdasarkan pada RKPD untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi mencapai tujuan negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, dinyatakan bahwa “penyusunan APBD harus berlandaskan penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah, serta Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, penting untuk mempertimbangkan setiap unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kemampuan daerah, yakni seberapa besar pencapaian dan kontribusi setiap tahunnya. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan finansial daerah selama ini.

Untuk melaksanakan penilaian tersebut, bisa dihitung tingkat efisiensi serta efektivitas dari pencapaian tujuan setiap program pembangunan yang telah ditentukan selama satu periode tahun anggaran terkait. Prosedur evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran belanja yang telah ditentukan untuk setiap program kegiatan di masing-masing kecamatan dengan realisasi penggunaan yang berhasil dicapai pada tahun anggaran tersebut.

2.1.4 Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Keuangan

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi keuangan pada sektor perumahan dan pemukiman menurut Santoso (2021) adalah:

1. Perencanaan Anggaran
Perencanaan yang matang akan mengurangi risiko pemborosan anggaran.
2. Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Monitoring yang baik dapat mendeteksi ketidakefisienan dalam penggunaan dana.
3. Sumber Daya Manusia
Kompetensi pegawai dalam mengelola anggaran turut berpengaruh pada efisiensi keuangan (Iskandar, 2020).
4. Teknologi dan Digitalisasi
Penggunaan sistem digital dalam manajemen keuangan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan (Fahmi, 2023).
5. Studi Empiris tentang Efisiensi Keuangan dalam Sektor Publik
Beberapa penelitian yang relevan dengan efisiensi keuangan dalam sektor publik telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2023) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja lebih efisien dalam pengelolaan anggaran dibandingkan dengan daerah yang masih menggunakan pendekatan tradisional. Sementara itu, penelitian oleh Prasetyo (2021) menyatakan bahwa efisiensi keuangan pada sektor perumahan dan pemukiman dapat meningkat dengan adanya kebijakan yang jelas serta implementasi sistem penganggaran berbasis teknologi.

Menurut Suyanto (2021), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi efisiensi keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketersediaan SDM yang kompeten dalam mengelola keuangan daerah akan mempengaruhi sejauh mana pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan efisien. Tanpa adanya keahlian yang memadai, penggunaan anggaran bisa menjadi tidak optimal.

b. Sistem Pengelolaan Keuangan yang Baik.

Penggunaan sistem informasi yang canggih dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, daerah dapat menghindari pemborosan serta meningkatkan pemantauan anggaran.

c. Kondisi Ekonomi Daerah.

Kondisi perekonomian daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola keuangan. Daerah dengan perekonomian yang berkembang cenderung memiliki lebih banyak sumber pendapatan untuk mendanai kegiatan pemerintahannya.

Efisiensi keuangan di tingkat pemerintahan daerah menjadi kunci dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Anggaran yang dikelola dengan efisien dapat mengurangi beban keuangan negara dan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, efisiensi keuangan dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan dana baik dari pusat maupun investor.

Indikator efisiensi keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk menentukan sejauh mana keuangan daerah dikelola secara baik dan optimal. Penerapan prinsip-prinsip efisiensi ini akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada.

Efisiensi keuangan dalam sektor perumahan dan pemukiman merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai indikator seperti rasio efisiensi anggaran dan operasional. Faktor-faktor seperti perencanaan

yang matang, pengawasan ketat, serta digitalisasi keuangan turut berperan dalam meningkatkan efisiensi keuangan.

Dalam prinsipnya, penggunaan anggaran harus memenuhi unsur, yaitu:

a. Kesejahteraan masyarakat

Secara harfiah, istilah sejahtera berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu CATERA, yang berarti payung. Ini merujuk kepada masyarakat yang sejahtera, yakni individu yang menjalani kehidupan bebas dari kemiskinan, kekhawatiran, dan kebodohan, sehingga hidupnya aman dan tenang, baik secara fisik maupun emosional. (Fahrudin, 2014). Kesejahteraan masyarakat berarti kondisi di mana kebutuhan hidup dapat terpenuhi, yang dapat dilihat dari keadaan rumah yang layak untuk ditinggali, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, keterjangkauan biaya pendidikan dan kesehatan, serta kualitas hidup yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan utilitas mereka pada batas tertentu, di mana seseorang dapat memenuhi baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan spiritualnya. (Marbun, Sitinjak, & Ndraha, 2020).

b. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai proses yang memenuhi kebutuhan zaman sekarang tanpa mengorbankan hak untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan memiliki makna bahwa kualitas kehidupan manusia dijamin dan tidak melebihi kapasitas ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian, definisi pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi depan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

2.1.5 Indikator Efisiensi Keuangan

Menurut Widodo (2022), menguraikan beberapa indikator efisiensi keuangan dalam instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

a. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Operasional.

Rasio ini menunjukkan proporsi belanja modal yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur daerah dibandingkan dengan belanja operasional yang lebih sering digunakan untuk kegiatan rutin. Peningkatan rasio ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut lebih fokus pada pembangunan jangka panjang daripada hanya pada belanja rutin.

b. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokal (PAD) untuk membiayai belanja daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien daerah dalam menggali sumber pendapatan internal, mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat.

c. Rasio Penggunaan Dana untuk Program Prioritas.

Efisiensi keuangan juga tercermin dari alokasi dana yang tepat untuk program-program prioritas daerah yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jika dana lebih banyak digunakan untuk program yang memberikan dampak signifikan, maka efisiensi keuangan dapat dikatakan lebih baik.

2.2 Kerangka Berpikir

Efisiensi keuangan pada instansi pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Efisiensi ini berhubungan dengan bagaimana pemerintah daerah mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada untuk memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Dalam kerangka berpikir ini, analisis efisiensi keuangan akan berfokus pada

penggunaan anggaran, pengelolaan belanja, serta kinerja keuangan yang berorientasi pada hasil dan dampak positif bagi daerah.

Efisiensi keuangan dapat dipahami sebagai perbandingan antara input dan output dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, input mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh daerah, baik dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan dari pusat, sedangkan output merujuk pada hasil-hasil yang diperoleh dalam bentuk program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Sutrisno (2020), efisiensi dapat diukur dengan melihat sejauh mana penggunaan anggaran menghasilkan nilai tambah atau dampak yang diharapkan oleh masyarakat. Pengukuran efisiensi ini tidak hanya melihat aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitas dari hasil yang dicapai.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi keuangan pada instansi pemerintah daerah antara lain adalah perencanaan anggaran, pengawasan, dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Salam (2021) menekankan bahwa perencanaan anggaran yang baik harus disertai dengan analisis kebutuhan yang matang dan pemilihan prioritas yang tepat. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pelaporan keuangan juga berperan penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah dan kebijakan fiskal pemerintah pusat juga mempengaruhi efisiensi keuangan di tingkat daerah. Sebagai contoh, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan fiskal dapat mengurangi daya beli daerah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran.

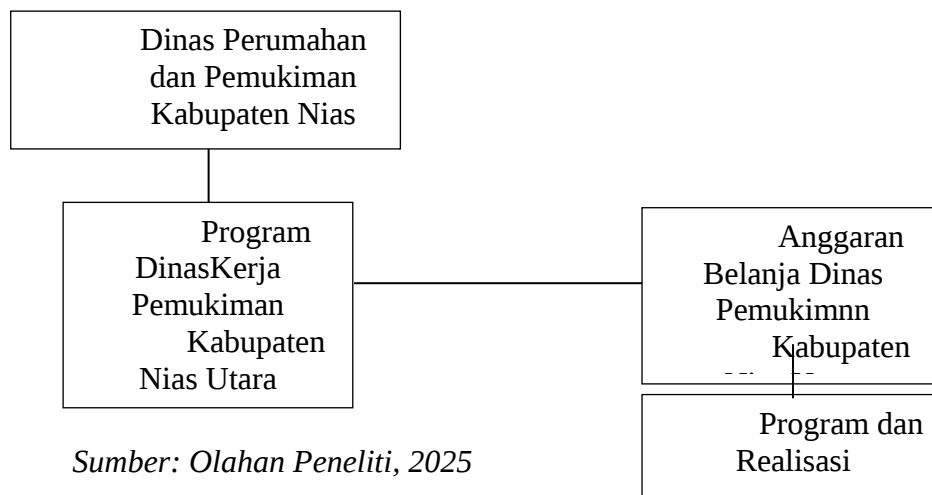
Analisis efisiensi keuangan pada instansi pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya analisis ini, pemerintah daerah dapat mengetahui area-area yang masih perlu diperbaiki dalam hal

pengelolaan keuangan dan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif.

Sebagai contoh, jika hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran daerah lebih banyak dialokasikan pada sektor yang tidak memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan dana tersebut untuk program-program yang lebih berdampak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Efisiensi menggambarkan hubungan antara *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Organisasi dikatakan efisien apabila dapat mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal. Pnetinga penilaian efisiensi adalah untuk mengukur kinerja organisasi, mengevaluasi penggunaan sumber daya dan menilai akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik. Oleh karena itu, maka kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1:
Kerangka Berpikir



2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya juga berperan untuk mengembangkan dan memperkaya berbagai teori yang akan diterapkan dalam studi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, umumnya, penelitian sebelumnya juga dapat berfungsi sebagai dasar teoritis karena memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian lain yang relevan dan dapat diterapkan dalam penelitian tersebut.

Oleh karena, dalam penelitian ini penulis dapat menguraikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kanjian penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Osi Kusumawati, Animah & Isnawati (2022)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram	Hasil kajian mengindikasikan bahwa kapasitas kinerja Dinas Sosial Kota Mataram pada tahun 2016-2020 telah mencapai standard efektivitas. Tingkat efisiensi sepanjang tahun-tahun tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran tergolong efisien, khususnya pada tahun 2016 dan 2019. Ini berarti bahwa berbagai program dapat dilaksanakan dengan sukses meskipun terdapat beberapa penghematan dalam anggaran.
2.	Ramlah Dhita Pratiwi Ar, Siti Adrianti Anwar, Murdin Muchsiddin & Halida Sasmita (2023)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinasm Pemuda dan Olahraga Kota Makassar	Hasil dari studi menunjukkan bahwa ukuran efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar antara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan variasi persentase nilai, meskipun kriteria yang digunakan tetap serupa yaitu tergolong efektif. Kriteria ini

			dianggap cukup efektif karena beberapa pos belanja yang terwujud mencapai 98%. Selain itu, pelaksanaan anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa di instansi tersebut dari tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan persentase nilai efisiensi yang beragam setiap tahunnya, walaupun secara keseluruhan dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan anggaran belanja yang belum berhasil memenuhi standar efisiensi, yaitu minimnya penggunaan dana untuk mendapatkan hasil yang optimal.
3.	Marniati; Winta Panimba & Milka Tasik Lintin (2023).	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2019-2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dimana penulis, mengamati, mencatat, menganalisis serta menyajikan hasil data yang diperoleh pada objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pada tahun 2019 kinerja pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja dinilai efektif dengan pencapaian kriteria sebesar 99,45%, pada tahun 2020 sebesar 91,78%

			dan pada tahun 2021 sebesar 93,27%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pada bagian pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja dinilai sangat Efisien, dengan pencapaian kriteria sebesar 46,71% pada tahun 2019, 32,71% pada tahun 2020 dan 1% pada tahun 2021.
4.	Deliana Br Perangin Angin & Melisa Zuriani Hasibuan (2021).	Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Medan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kinerja finansial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui analisis rasio kesesuaian pengeluaran, proporsi anggaran tidak langsung, dan sisa yang digunakan untuk pengeluaran langsung. Proporsi anggaran yang tidak langsung berkisar antara 82%, 78%, dan 83%. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 17,5%, 30%, 16,9%. Selama periode tiga tahun anggaran kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak baik selama tahun 2018-2020. Selanjutnya, kinerja finansial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis efektivitas pengeluaran selama tiga tahun menunjukkan efektivitas 100%, dengan persentase sebesar 291,30%, 140,56%, dan 160,16%. Di sisi lain, kinerja finansial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui analisis efisiensi

			pengeluaran daerah menunjukkan bahwa realisasi anggaran pengeluaran Dinas Kehutanan tidak tergolong efisien, karena rentang efisiensinya melebihi 100%. Diketahui bahwa efisiensi belanja Dinas Kehutanan mencapai 632,02%, 462,15%, dan 407,92% selama periode 2018-2020.
5.	Maria Paskalia Dua Vina, Henrikus Herdi & Pipiet Niken Aurelia (2023).	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	Hasil analisis mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran pada masa 2019-2021 secara keseluruhan menunjukkan tingkat keefektifan yang memadai, namun efisiensi selama periode yang sama tidak menunjukkan angka yang memuaskan. Di sisi lain, pertumbuhan juga terlihat fluktuatif dengan adanya periode kenaikan dan penurunan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka perlu memperhatikan situasi serta kondisi yang ada, agar anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan dengan optimal.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025